



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

KEMANTREN GONDOKUSUMAN

 Jl. Munggur 32 Yogyakarta

 (0274) 520234

 www.gondokusumankec.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

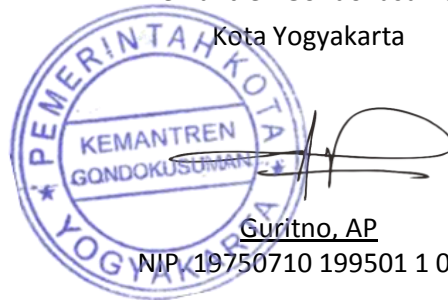
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Mantri Pamong Praja

Kemantren Gondokusuman

Kota Yogyakarta



Guritno, AP

NIP. 19750710 199501 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Perangkat Daerah:

“Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat”

Indikator sasaran strategis: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman

Target sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 : 400

Realisasi sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 : 400,6.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 81,75, jumlah pelanggaran perda sebanyak 283 dan angka swadaya murni masyarakat sebesar Rp 3.831.131.000,-

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kampung sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan wilayah mengacu pada dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi
3. Permasalahan lingkungan dan kesehatan sebagai akibat dinamisasi perkembangan perkotaan
4. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat
5. Percepatan pemulihan ekonomi akibat Covid-19

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
1.6 Keuangan	7
1.7 Sistematis LKj IP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021	14
2.3.1 Target Belanja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	14
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17
3.2.1 Sasaran Strategis : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman Meningkatkan	17
3.3 Realisasi Anggaran	25
3.4 Inovasi	29
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN- LAMPIRAN	37

Daftar Tabel

- Tabel 1.1 Karyawan Kemantren Gondokusuman
- Tabel 1.2 Data PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Penjurangan
- Tabel 1.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 1.4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon
- Tabel 1.5 Data PNS Kelurahan
- Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kemantren Gondokusuman
- Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
- Tabel 2.2 Sasaran Strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta
- Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan
- Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Tabel 2.6 Target Belanja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2021
- Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
- Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
- Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.5 Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman Tahun 2019 – 2021
- Tabel 3.6 Hasil Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tahun 2021
- Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kemantren Gondokusuman, Kraton dan Mergangsan
- Tabel 3.8 Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021
- Tabel 3.9 Capaian Nilai SKM Kemantren Gondokusuman Tahun 2019-2021
- Tabel 3.10 Program Pemberayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Tabel 3.11 Angka Swadaya Murni Tahun 2021
- Tabel 3.12 Data Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2021
- Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program/Kegiatan Tahun 2021
- Tabel 3.15 Analisis Efisiensi

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren

Gambar 1.2 Diagram Proporsi Pegawai

Gambar 1.3 Diagram Proporsi Anggaran Tahun 2021

Gambar 1.4 Diagram Proporsi Anggaran per Program TA 2021

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta
2. Mendorong Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

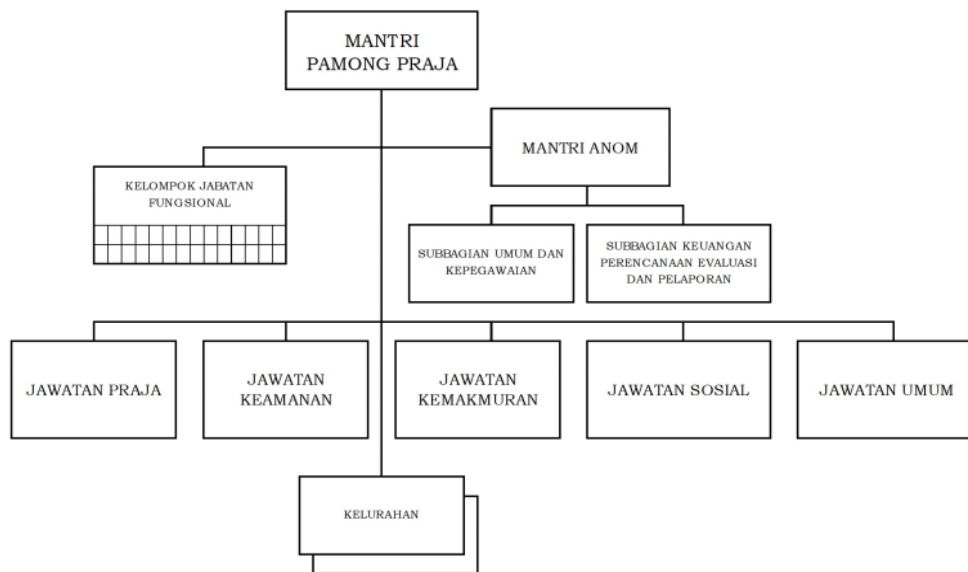
Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Mantri Pamong Praja;
- b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Kemakmuran;
 - e. Jawatan Umum;
 - f. Jawatan Sosial;
 - g. Jawatan Keamanan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan menetapkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kemantren mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;

- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kampung sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan wilayah mengacu pada dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi
3. Permasalahan lingkungan dan kesehatan sebagai akibat dinamisasi perkembangan perkotaan
4. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat
5. Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kemantren Gondokusuman didukung oleh 51 orang karyawan terdiri atas 44 orang Pegawai Negeri Sipil, 6 (enam) orang Tenaga Teknis dan 1 (satu) orang Naban. Adapun komposisi karyawan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Karyawan Kemantren Gondokusuman

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2	Mantri Anom	1	-	-	-	-	1	1
3	Ka. Jawatan	1	4	-	-	5	-	5
4	Kasubag	1	1	-	-	2	-	2
5	JFU Kemantren	2	5	-	3	4	-	7
6	JFT Kemantren	-	-	-	-	-	-	0
7	Naban Kemantren	1	-	-	-	-	-	1
8	Tenaga Teknis	1	1	-	-	-	-	2
9	Lurah	5	-	-	-	4	1	5
10	Sekretaris kelurahan	3	2	-	-	5	-	5
11	Kasi Kelurahan	7	8	-	-	15	-	15
12	JFU kelurahan	3	-	-	2	1	-	3
13	Naban kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
14	Tenaga Teknis	1	3	-	-	-	-	4
	Jumlah	27	24	-	5	36	3	51

Tabel 1.2 Data PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	20	8	12
3	ADUM	3	2	1
4	SEPADA	0	-	-
5	Struktural yang belum diklat	10	8	2

Tabel 1.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – laki	Perempuan
1	S2	4	2	2
2	D IV/ S1	26	15	11
4	D III	5	3	2
5	SLTA	9	4	5
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
	Jumlah	44	24	20

Tabel 1.4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon

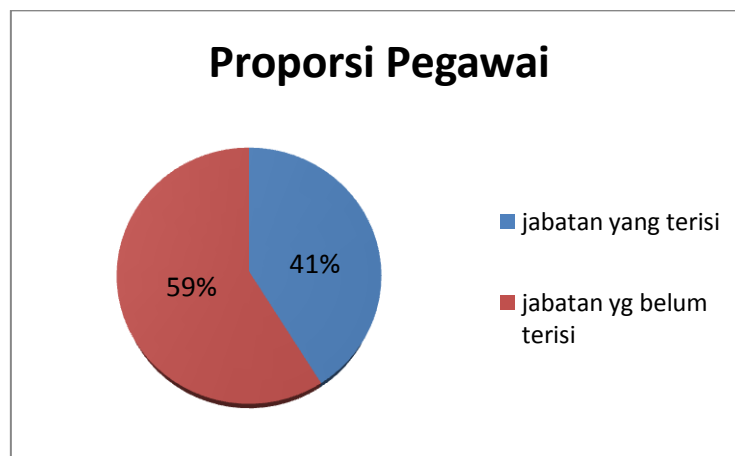
No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Lak-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	10	7	3
4	IV B	22	10	12

Dibanding tahun 2020 telah terjadi sedikit pergeseran komposisi PNS pada tahun 2021, baik itu dari sisi kuantitas, tingkat pendidikan dan persentase pemenuhan jabatan. Dari sisi kuantitas terjadi penambahan sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 orang CPNS, 2 orang pejabat struktural, dan 1 orang mutasi.

Berdasarkan analisis jabatan, kekurangan SDM terdapat pada Jawatan Praja, dimana pada Jawatan tersebut tidak ada pelaksana, dan pada Kesekretariatan, yaitu tidak ada Verifikator Keuangan, Pengelola Akuntansi, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, dan Pengelola Teknologi Informasi.

Jika melihat dari peta jabatan Kemantren/ Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Nomor 457 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta maka jumlah ideal PNS di Kemantren Gondokusuman adalah sebanyak 107 orang namun baru terisi sebanyak 44 orang atau secara proporsi baru terpenuhi sebesar 41% (Gambar 1.2). Dengan meningkatnya porsi anggaran pada tahun 2021 di masing-masing Kelurahan, maka beban pekerjaan semakin bertambah namun hal tersebut tidak diimbangi dengan penambahan pegawai. Kondisi pegawai di Kelurahan dari segi usia sudah banyak yang mendekati usia pensiun dan dari segi kapasitas kompetensinya juga masih banyak yang kurang, sehingga perlu tambahan pegawai dan peningkatan keahlian untuk pengelolaan anggaran Kelurahan yang semakin besar. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5.

Gambar 1.2 Diagram Proporsi Pegawai



Tabel 1.5 Data PNS Kelurahan

No	Kelurahan	Usia			Pendidikan				Jumlah
		30-40	40-50	50-58	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Demangan	-	4	1	1	-	4		5
2	Kotabaru	-	3	3	3	-	3	-	6
3	Klitren	-	2	4	2	-	4	-	6
4	Baciro	-	2	3	1	1	3	-	5
5	Terban	1	4	1	1	1	2	2	6
Jumlah		1	15	12	8	2	16	2	26

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemantren Gondokusuman didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Kemantren Gondokusuman mempunyai kendaraan roda 2 sebanyak 18 buah, roda 3 sebanyak 3 buah dan roda 4 sebanyak 1 buah. Dan untuk mendukung kelancaran kinerja berikut ini disajikan sarana prasarana yang tersedia di Kemantren Gondokusuman beserta kondisinya.

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kemantren Gondokusuman

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	1	Baik
2	Motor	18	Baik
3	Roda 3	3	Baik
4	Ac	10	Baik
5	Almari	36	Baik
6	Filling	41	Baik
7	HT	8	Baik
8	LCD Projector	6	Baik
9	Printer	23	Baik
10	Komputer	33	Baik
11	Laptop	4	Baik
12	Notebook	7	Baik
13	Apar	65	Baik
14	Kursi	676	Baik
15	Meja	157	Baik
16	Kamera	7	Baik
17	Wirelles	7	Baik
18	TV	9	Baik
19	CCTV	1	Baik
20	Whiteboard	17	Baik
21	Telepon	11	Baik
22	Brankas	5	Baik
23	Almari Es	1	Baik

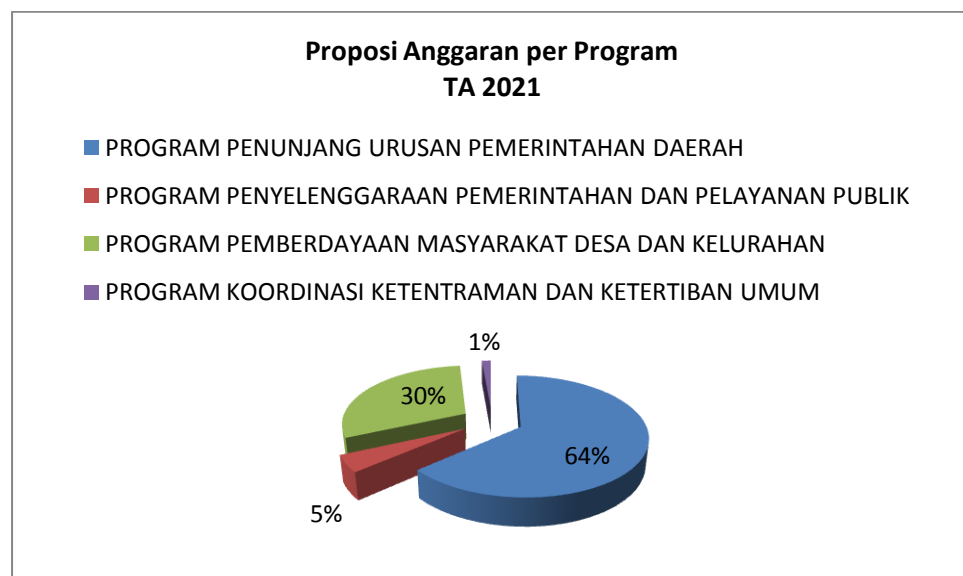
1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 13.478.638.993,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 10.929.739.493,- dan belanja modal sebesar Rp 2.548.899.500,-. Anggaran tersebut untuk mendukung 4 (empat) program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan di Kemantren Gondokusuman.

Gambar 1.3 Diagram Proporsi Anggaran Tahun 2021



Gambar 1.4 Diagram Proporsi Anggaran per Program TA 2021



1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2021*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Gondokusuman mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada sasaran:

1. Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran yaitu angka kemiskinan
2. Keberdayaan masyarakat meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu indeks keberdayaan masyarakat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu pola pangan harapan

4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun, dengan indikator capaian sasaran yaitu indeks ketimpangan pendapatan
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu angka pertumbuhan ekonomi
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran yaitu angka kriminalitas dan jumlah pelanggaran Perda
7. Kualitas pendidikan meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
8. Harapan hidup masyarakat meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu angka harapan hidup
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif
10. Kualitas lingkungan hidup meningkat, dengan indikator capaian sasaran indeks kualitas lingkungan hidup
11. Infrastruktur wilayah meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu indeks infrastruktur wilayah
12. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, dengan indikator capaian sasaran yaitu nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran adalah ***“Meningkatkan tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman”***.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2017	2018	2020	2020	2021	2022
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	-	350	385	390	395	400	405

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk itu Kemantren Gondokusuman menuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Program dan Kegiatan.

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeruntahan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Koordinasi Pemeliharaa Prasarana dan Sarana Pelyanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	-	400

Pada tahun 2021, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya rasionalisasi dan dinamika perkembangan di wilayah. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	-	400

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 13.092.985.269,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 11.234.808.419,- dan Belanja Modal Rp 2.858.176.850,-. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan ada penyesuaian jumlah peserta kegiatan sesuai dengan aturan PPKM. Di sisi lain, untuk mendukung program vaksinasi dan penanganan covid-19 di wilayah, serta peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan dukungan anggaran. Oleh karena itu, melalui mekanisme perubahan APBD 2021 maka anggaran Kemantren Gondokusuman menjadi Rp 13.478.638.993,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 10.929.739.493,- dan Belanja Modal Rp 2.548.899.500,-.

2.3.1 Target Belanja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

Target belanja Kemantren Gondokusuman Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut,

Tabel 2.6 Target Belanja Kemantren Gondokusuman APBD Perubahan Tahun 2021

URAIAN	TARGET	PROSENTASE
Belanja Operasi	Rp. 10.929.739.493,-	81,09 %
Belanja Pegawai	Rp. 6.352.535.568,-	58,12%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.577.203.925,-	41,88%
Belanja Modal	Rp. 2.548.899.500,-	18,91 %
Jumlah	Rp. 13.478.638.993,-	100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2021 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis (tidak termasuk gaji dan tunjangan ASN) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	ANGGARAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	7.126.103.425	52,87%	Belanja Barang dan Jasa Rp 4.577.203.925,- Belanja Modal Rp 2.548.899.500,-

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	-	400	400,6	100,15 %

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 1 (satu) indikator. Pada tahun 2021, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100,15 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman Meningkat

Tolok ukur capaian sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Kinerja sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	395	400	400,6	100,15 %	405	98,91%

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan digunakan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penilaian dilakukan secara bertahap, dimana yang pertama adalah Kelurahan melakukan evaluasi diri melalui aplikasi dengan link <http://epdeskel.kemendagri.go.id> setelah itu baru dilakukan penilaian di tingkat Kemantren.

Evaluasi perkembangan ini dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Pemerintahan;
 - b. Kinerja;
 - c. Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/ *e-government*; dan
 - e. Pelestarian adat dan budaya.
2. Bidang Kewilayahan
 - a. Identitas;
 - b. Batas;
 - c. Inovasi;
 - d. Tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. Pengaturan investasi.
3. Bidang Kemasyarakatan
 - a. Partisipasi masyarakat;
 - b. Lembaga kemasyarakatan;
 - c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. Keamanan dan ketertiban;
 - e. Pendidikan;
 - f. Kesehatan;
 - g. Ekonomi;
 - h. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

Target nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman tahun 2021 adalah sebesar 400 dan terealisasi sebesar 400,6. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dihitung dari jumlah nilai evaluasi kelurahan dibagi 5 (lima) kelurahan sehingga hasil yang diperoleh adalah sebesar 400,6.

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan per Kelurahan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman Tahun 2019 - 2021

No	Kelurahan	2019	2020	2021
1	Demangan	383	391	399
2	Kotabaru	395	395	396
3	Klitren	394	397	400
4	Baciro	391	394	396
5	Terban	388	398	412
	Jumlah	1951	1975	2003
	Nilai	390,2	395	400,6

Dari data capaian tersebut untuk tahun 2021 tertinggi diperoleh Kelurahan Terban kemudian Klitren, Demangan, Baciro, dan Kotabaru. Sebagai Kelurahan dengan perolehan nilai tertinggi maka Kelurahan Terban diajukan untuk mengikuti Lomba Kelurahan tingkat Kota. Hasilnya, Kelurahan Terban menjadi Kelurahan Terbaik Peringkat I tingkat Kota Yogyakarta pada tahun 2021, dan maju di tingkat Provinsi DIY dengan hasil juara I tingkat Provinsi DIY tahun 2021.

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dari tahun ke tahun selalu meningkat. Prosentase capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat sebesar 1,23% dari nilai 390,2 dan di tahun 2021 meningkat sebesar 1,41% dari nilai 395. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022 sebesar 405 maka capaian yang diperoleh pada tahun 2021 adalah sebesar 98,91% dari target akhir Renstra.

Perkembangan pembangunan di masing-masing Kelurahan paling besar pada bidang kemasyarakatan kemudian bidang pemerintahan dan bidang kewilayahan. Pada tahun 2021, perkembangan pembangunan di bidang pemerintahan untuk 5 Kelurahan relatif sama, sedangkan untuk bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan terdapat selisih yang cukup banyak dimana nilai tertinggi diperoleh Kelurahan Terban. Hal ini dikarenakan adanya inovasi-inovasi pada bidang kewilayahan yang dilakukan oleh Kelurahan Terban dan komunikasi aktif serta komitmen bersama para stakeholder di bidang kemasyarakatan yang melibatkan 5 K (Kota, Kampung, Komunitas, Kampus dan Korporat) sehingga dapat meningkatkan perolehan nilai.

Tabel 3.6 Hasil Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tahun 2021

Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai
Demangan	117	92	190	399
Kotabaru	116	89	191	396
Klitren	117	90	193	400
Baciro	116	92	188	396
Terban	118	96	198	412

Nilai evaluasi perkembangan yang diatas 351 tersebut berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2015 menunjukkan bahwa Kelurahan-kelurahan yang ada di Kemantren Gondokusuman adalah Kelurahan yang cepat berkembang. Faktor pendorong yang dapat meningkatkan nilai tersebut adalah adanya komitmen bersama dan koordinasi yang baik serta rutin secara formal maupun nonformal dari seluruh stakeholder.

Target nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman jika dibandingkan dengan target nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dan Mergangsan memiliki nilai interval yang sama, yaitu 5. Perbandingan capaian realisasi untuk Kemantren Gondokusuman adalah meningkat sebanyak 5,6 poin, sedangkan

Kemantren Kraton meningkat 14 poin, dan Kemantren Mergangsan meningkat 6 poin. Realisasi ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kemantren Gondokusuman, Kraton dan Mergangsan

Tahun	Target			Realisasi		Selisih
	2020	2021	2022	2020	2021	
GK	395	400	405	395	400,6	5,6
KT	325	346,67	351,67	350,67	364,67	14
MG	390	395	400	391	397	6

Berdasarkan perbandingan diatas menunjukkan bahwa peningkatan capaian realisasi Kemantren Gondokusuman paling rendah dibandingkan dengan Kemantren Kraton dan Kemantren Mergangsan. Peningkatan tersebut tampak tidak terlalu signifikan jika dibandingkan Kemantren Kraton karena Kemantren Gondokusuman sudah berada pada nilai evaluasi yang paling tinggi dibandingkan Kemantren Kraton dan Kemantren Mergangsan. Peningkatan capaian nilai evaluasi perkembangan Kemantren Gondokusuman merupakan hasil dari upaya dalam mewujudkan perkembangan pembangunan di wilayah Kemantren Gondokusuman yang didukung oleh peran stakeholder.

Pada bidang Pemerintahan, untuk mendukung tugas dan kelancaran administrasi di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, dan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, mulai tahun 2021 Kemantren tidak lagi melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh namun Kemantren masih diberi kewenangan untuk membantu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengajuan permohonan administrasi kependudukan secara daring bagi yang yang tidak mempunyai HP dan/atau gagap teknologi, membantu masyarakat mencetak dokumen administrasi kependudukan hasil layanan daring berupa cetak KK dan Akta, serta menerima konsultasi tentang mekanisme layanan daring kepada masyarakat. Meski terdampak pandemic covid-19, namun pelayanan di Kemantren Gondokusuman tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan hasil Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) yang melebihi target yaitu sebesar 81,75 dengan kategori Baik. Penilaian ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur dengan hasil penilaian setiap unsur sebagai berikut:

Tabel 3.8 Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No.	Unsur	Nilai
1	Persyaratan Pelayanan	3,313
2	Prosedur Pelayanan	3,327
3	Waktu Pelayanan	3,193
4	Biaya/ Tarif	3,473
5	Produk Pelayanan	3,247
6	Kompetensi Pelaksana	3,387
7	Perilaku Pelaksana	3,327
8	Maklumat Pelayanan	3,253
9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,207

Dari 9 (sembilan) unsur yang dijadikan parameter dalam pengukuran SKM, maka unsur yang perlu ditingkatkan adalah waktu pelayanan. Di Kemantren Gondokusuman secara umum pelayanan bisa dilakukan secara online namun ada beberapa pelayanan yang terkait dengan rekomendasi tidak bisa dilakukan secara online sehingga pemohon datang sendiri ke Kemantren. Sedangkan yang mempengaruhi nilai rendah pada indikator waktu pelayanan adalah sistem online dimana masyarakat yang seharusnya sudah bisa input data permohonan secara online tetapi masih datang langsung ke Kemantren sehingga petugas operator harus melakukan input data, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses aplikasi JSS. Selain itu, jika pemohon datang ke Kemantren untuk pelayanan umum sering kali masih terdapat kekurangan persyaratan sehingga perlu waktu untuk melengkapi seluruh persyaratan hingga permohonan diterima.

Jika dilihat selama 3 (tiga) tahun terakhir nilai SKM Kemantren Gondokusuman selalu mengalami peningkatan. Dengan capaian ini menunjukkan bahwa Kemantren Gondokusuman selalu memberikan upaya pelayanan yang terbaik bagi warganya yang didukung dengan kecakapan petugas dalam melayani, kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan dan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan prima.

Tabel 3.9 Capaian Nilai SKM Kemantren Gondokusuman Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai SKM
2019	81,03
2020	81,44
2021	81,75

Di sisi lain dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah DIY dengan Dana Keistimewaan membentuk Kelurahan budaya dan kelurahan rintisan budaya untuk pengembangan potensi dan pelestarian seni budaya. Kelurahan Terban merupakan salah satu kelurahan yang telah dikukuhkan sebagai kelurahan budaya dimana kegiatan seni dan budaya yang ada di masyarakat Kelurahan Terban masih dipertahankan seperti jatilan, karawitan, keroncong,

merti kelurahan dan sebagainya. Pada tahun 2021, dalam situasi pandemi Covid-19 kegiatan budaya di Kelurahan Terban tetap eksis meski dengan keterbatasan dana dan pelaksanaan menyesuaikan protokol kesehatan. Salah satunya pada bulan Desember 2021 Kelurahan Terban juga mengikuti festival Ketoprak tingkat Provinsi DIY di Gedung Kesenian Gabusan, Bantul.

Pada bidang Kewilayahan, Kelurahan memiliki monografi yang memuat tentang data umum, personil, kewenangan, keuangan dan kelembagaan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan. Dengan adanya monografi akan mempermudah pihak yang ingin memerlukan informasi dan data dari suatu wilayah.

Berdasarkan struktur kondisi wilayah, Kemantren Gondokusuman masuk dalam wilayah rawan banjir oleh karena itu perlu adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kelurahan Tanggap Bencana (KATANA) merupakan bentuk kegiatan yang ada pada tingkat Kelurahan. KATANA adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Kelurahan Klitren dan Baciro merupakan kelurahan di Kemantren Gondokusuman yang sudah dikukuhkan menjadi Kelurahan Tanggap Bencana karena kelurahan tersebut berada di wilayah yang rawan banjir. Selain itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat bawah juga telah dibentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB). Dari 17 Kampung yang ada di Kemantren Gondokusuman, semuanya sudah terbentuk KTB, bahkan ada 1 kampung yang memiliki 2 KTB yaitu Kampung Kepuh, sehingga total ada 18 KTB.

Selain itu, sebagai upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial DIY juga membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di lokasi rawan bencana. Peran dari kampung siaga bencana ini sangat dibutuhkan untuk penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Di Kemantren Gondokusuman, baru Kelurahan Kotabaru yang ditetapkan sebagai KSB. KSB Kotabaru dilengkapi dengan Gardu Sosial dan Lumbung Logistik. Gardu sosial berfungsi untuk tempat koordinasi, konsolidasi dan musyawarah antar warga masyarakat untuk membicarakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Sedangkan lumbung logistik dibentuk sebagai sarana penyimpanan peralatan-peralatan penanggulangan bencana maupun logistik.

Pada bidang Kemasyarakatan, untuk mewujudkan visi Walikota Yogyakarta maka melalui misi pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, Kemantren Gondokusuman memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Tabel 3.10 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Realisasi	Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	4.831.000.000	3.831.131.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Angka swadaya murni merupakan indikator kemandirian masyarakat dimana dalam setiap kegiatan pembangunan di Kelurahan yang menggunakan swadaya murni berarti semua biaya didanai oleh masyarakat. Semakin tinggi angka swadaya murni artinya semakin tinggi tingkat kemandirian dan kepedulian masyarakat di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, perolehan angka swadaya murni tertinggi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.10 diraih oleh Kelurahan Baciro, yaitu sebesar Rp 2.506.205.000,-. Dan secara total, angka swadaya murni Kemantren Gondokusuman memperoleh 79,30% dari angka yang telah ditargetkan. Capaian yang rendah disebabkan karena laporan swadaya masyarakat yang diterima dari Lembaga Kemasyarakatan kurang lancar, pertemuan-pertemuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berkurang dan juga partisipasi masyarakat dalam berswadaya untuk penanganan Covid 19 sudah berkurang (kondisi pandemi Covid 19 sudah membaik). Namun demikian, kondisi di setiap wilayah Kelurahan berbeda-beda tergantung dari keluasan wilayah dan juga masyarakatnya. Dengan perolehan angka swadaya murni sebesar Rp3.831.131.000 menunjukkan bahwa kemandirian dan kepedulian masyarakat di wilayah Kemantren Gondokusuman cukup tinggi.

Tabel 3.11 Angka Swadaya Murni Tahun 2021

No.	Kelurahan	2021
1	Demangan	190.727.000
2	Kotabaru	469.050.000
3	Klitren	148.470.000
4	Baciro	2.506.205.000
5	Terban	516.679.000
	Jumlah	3.831.131.000
	Target Swadaya Murni	4.831.000.000
	Capaian Swadaya Murni	79,30%

Selain itu, di Kelurahan Baciro juga telah terbentuk Puskesmas, yaitu sebuah layanan Sosialisasi Pusat Kesejahteraan Sosial yang dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin mendapatkan perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan. Puskesmas ini merupakan lembaga yang biasanya berada di daerah dan berperan menjangkau warga rentan miskin. Puskesmas Kelurahan Baciro menjadi *pilot project* tingkat Kota Yogyakarta.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang ke arah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab Kemantren Gondokusuman. Adanya dinamika di masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya perlu upaya dalam hal penegakan Perda dan Perkada dimana hal ini menjadi tanggung jawab Jawatan Keamanan dan juga BKO Satpol PP yang ada di Kemantren Gondokusuman.

Beberapa pelanggaran Perda masih kerap dijumpai di wilayah Kemantren Gondokusuman, seperti pemasangan spanduk reklame, pembangunan rumah, penyelenggaraan pondokan yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang semestinya. Dan adanya PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan tetapi mengganggu ketertiban umum. Selama tahun 2021, Jawatan Keamanan beserta BKO Satpol PP telah melakukan penyisiran dalam upaya penegakan Perda dan Perkada, dan memperoleh jumlah pelanggaran sebanyak 283 pelanggaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.11. Perolehan tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 300 jumlah pelanggaran. Artinya, Jawatan Keamanan dan BKO Satpol PP Kemantren Gondokusuman telah berhasil melakukan pembinaan terhadap para pelanggar dan melakukan komunikasi secara persuasif sehingga jumlah pelanggaran dapat diminimalkan.

Tabel 3.12 Data Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2021

Jenis Pelanggaran	TW I	TW II	TW III	TW IV
Sampah Visual	84	40	36	30
IMB	7	12	8	5
PKL	4	16	12	20
Pondokan	0	4	3	2
Jumlah	95	72	59	57
Total	283			

Capaian kinerja Kemantren Gondokusuman berhasil karena didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai
2. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah
3. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik
4. Adanya rapor PPTK untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja PPTK
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemantren Gondokusuman telah berjalan dan memperoleh nilai zona integritas yang baik

Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai evaluasi kinerja Kemantren Gondokusuman yang memperoleh penghargaan Juara Terbaik I se-Kota Yogyakarta, yang juga didukung dengan nilai perolehan reformasi birokrasi sebesar 91,98 atau terbaik ke-4 dari 50 OPD yang ada di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM/ personil dan banyak yang sudah memasuki usia pensiun
2. Kompetensi SDM yang masih kurang
3. Adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana atau tertunda atau terasionalisasi.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menambah jumlah SDM yang berkompeten
2. Mengusulkan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2021

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 96,72% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 98,78%, program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 98,29% dan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 98,33% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 95,66%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Niai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	400	400,6	100,15%	7.126.103.425,00	6.976.419.835,03	97,90%
Jumlah			400	400,6	100%	7.126.103.425,00	6.976.419.835,03	97,90%
Total Belanja						7.126.103.425,00	6.976.419.835,03	97,90%

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program/Kegiatan Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		8.155.171.056,00	7.801.221.059,00	95,66%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.792.000,00	12.490.000,00	97,64%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.190.000,00	99,17%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.692.000,00	2.500.000,00	92,87%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.900.000,00	8.800.000,00	98,88%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.355.776.568,00	6.063.232.317,00	95,40%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.352.535.568,00	6.059.993.917,00	95,39%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.000,00	196.000,00	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.000,00	360.000,00	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	90.000,00	90.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	285.000,00	282.400,00	99,09%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.647.209,00	238.038.600,00	99,74%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.980.000,00	10.617.000,00	96,69%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.960.209,00	109.802.600,00	99,86%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.130.000,00	47.130.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.577.000,00	70.489.000,00	99,88%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.400.000,00	112.378.800,00	95,72%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.400.000,00	112.378.800,00	95,72%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	906.530.509,00	859.318.069,00	94,79%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.200.000,00	100.806.560,00	79,25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	774.530.509,00	753.711.509,00	97,31%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.023.770,00	515.763.273,00	98,42%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.629.500,00	43.132.488,00	86,91%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	35.330.000,00	98,14%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.747.785,00	435.150.785,00	99,86%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.646.485,00	2.150.000,00	81,24%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		553.834.260,00	547.096.407,40	98,78%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.873.148,00	185.179.418,00	98,57%
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	187.873.148,00	185.179.418,00	98,57%
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	169.187.400,00	168.293.715,00	99,47%
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	169.187.400,00	168.293.715,00	99,47%
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	196.773.712,00	193.623.274,40	98,40%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	51.923.712,00	51.834.294,40	99,83%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	143.250.000,00	140.188.980,00	97,86%

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.478.519.995,00	4.401.830.122,63	98,29%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.478.519.995,00	4.401.830.122,63	98,29%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.293.426.836,00	2.271.382.173,83	99,04%
	Demangan	601.466.062,00	599.666.600,00	99,70%
	Kotabaru	267.931.509,00	267.931.000,00	100,00%
	Klitren	367.651.500,00	365.716.100,00	99,47%
	Baciro	360.681.890,00	356.790.598,83	98,92%
	Terban	695.695.875,00	681.277.875,00	97,93%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.185.093.159,00	2.130.447.948,80	97,50%
	Demangan	414.116.286,00	414.071.577,20	99,99%
	Kotabaru	200.036.000,00	196.956.000,00	98,46%
	Klitren	458.976.136,00	441.674.427,20	96,23%
	Baciro	782.609.356,00	751.053.147,20	95,97%
	Terban	329.355.381,00	326.692.797,20	99,19%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		291.113.682,00	286.266.163,00	98,33%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	255.113.682,00	250.331.163,00	98,13%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	255.113.682,00	250.331.163,00	98,13%
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	36.000.000,00	35.935.000,00	99,82%
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36.000.000,00	35.935.000,00	99,82%

Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 8.155.171.056,00 didukung oleh 6 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dari anggaran tersebut diperoleh realisasi sebesar Rp 7.801.221.059,00 (95,66%) dengan realisasi tertinggi pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 99,74% dan terendah pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 94,79%. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena belanja pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai tagihan pembayaran, dan hanya terealisasi 79,25%.

Anggaran program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp 553.834.260,00 didukung oleh 3 kegiatan, yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dari anggaran tersebut diperoleh realisasi sebesar Rp 547.096.407,40 (98,78%) dengan realisasi

tertinggi pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sebesar 99,47% dan terendah pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar 98,40%. Capaian seluruh kegiatan diatas 95% yang artinya bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tatakala yang telah disusun.

Anggaran program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp 4.478.519.995,00 didukung oleh 1 kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Dari anggaran tersebut diperoleh realisasi sebesar Rp 4.401.830.122,63 (98,29%). Kegiatan Pemberdayaan terdiri dari 2 sub kegiatan yang ada di 5 Kelurahan, yaitu Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Capaian dari seluruh sub kegiatan di masing-masing Kelurahan diatas 95%, hal ini karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 3.15 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Niai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	100,15%	96,72%	3,28%

Analisis Efisiensi

Dari satu sasaran strategis, tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat, sasaran kinerjanya sudah melebihi target, yaitu sebesar 100,15% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,28%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2021 inovasi yang telah dilakukan maupun yang sedang diinisiasi oleh Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. KAMPUNG BACA PENGOK KELURAHAN DEMANGAN

Kampung Pengok terletak di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman, yang terdiri dari 4 Rukun Warga yaitu RW 9, 10, 11 dan 12. Adanya kepedulian warga masyarakat di Kampung Pengok terhadap minat baca warga baik untuk anak-anak maupun orang dewasa maka dibentuklah Kampung Baca Pengok. Kampung Baca Pengok merupakan salah

satu dari tujuh taman baca masyarakat (TBM) yang ada di Kota Yogyakarta. TBM Kampung Pengok beroperasi setiap satu kali dalam seminggu. Pada Sabtu pagi, sejumlah warga akan mulai berdatangan ke balai RW untuk aktivitas membaca ataupun hal lainnya. Di era sekarang ini sangat dibutuhkan buku-buku bacaan dalam rangka membudayakan masyarakat untuk senang membaca buku dan berliterasi karena buku merupakan jendela dunia.

Dengan adanya kampung baca ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah pengetahuan masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan minat baca yaitu melalui kegiatan literasi mandiri maupun terapan. Layanan kampung baca Pengok selama pandemi covid-19 juga tetap berjalan melayani warga untuk meminjam, membaca buku-buku bacaan di kantor Kampung Baca Pengok dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan sebagai upaya adaptasi di masa pandemi covid-19, Kampung Baca Pengok mengembangkan perpustakaan daring guna memperkuat layanan dan gerakan literasi melalui <http://kaca.pengok.web.id/>. Seluruh informasi dari koleksi ratusan buku yang dimiliki dapat terakses secara online melalui web tersebut.



Foto 1. Halaman website Kampung Baca Pengok



Foto 2. Perpustakaan Kampung Baca Pengok

Selain itu, agar masyarakat sekitar di RW 12 lebih gemar membaca maka Kampung Pengok bekerjasama dengan TBM Tanjung Pustaka bersama-sama membuat pojok baca salah satunya di warung makan Mbak Siti, dan nantinya akan dilanjutkan untuk dikembangkan di tempat-tempat lain di wilayah Kampung Baca Pengok.

2. KAMPUNG LAMPION KELURAHAN KOTABARU

Kampung lampion terletak di wilayah RT 18 RW 04 Kelurahan Kotabaru atau biasa disebut daerah Ledok Code. Dengan lokasi wilayah yang berada di pinggiran kali membuat warga Ledok Code berinisiatif membentuk Kampung Lampion dengan tujuan memperbaiki kampung yang mereka huni agar menjadi lebih indah. Dalam membangun Kampung Lampion warga Ledok Code berkolaborasi dengan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan dengan dana swadaya berusaha menunjukkan bahwa Ledok Code merupakan kampung yang layak huni dan layak visitasi.

Adanya kampung lampion ini membuat kampung menjadi lebih hidup dan menyala pada malam hari. Ditambah lagi, adanya lorong sayur di sepanjang kampung, membuat suasana kealaman di kampung ini terasa. Selain itu, warga juga merubah barang-barang bekas yang ada di sekitar mereka seperti kaleng cat, botol minum plastik bekas, dan sendok plastik menjadi barang lampion cantik yang menghiasi teras rumah dan sepanjang jalan kampung. Tembok rumah warga pun dipercantik dengan gambar mural. Serta pada beberapa sudut disiapkan ikon yang *instagrammable*, cocok untuk anak muda yang suka berswafoto (*selfie*).



Foto 3. Kampung Lampiran Code 18



Foto 4. Warga membuat kerajinan lampiran

3. BACIRO LARAS

Dalam rangka mendukung Kelurahan Baciro sebagai Kelurahan Rintisan Budaya maka dibentuklah kelompok karawitan yang bernama Baciro Laras dengan anggota 25 orang. Kelompok ini terdiri dari para warga di lingkungan Kelurahan Baciro yang sama-sama memiliki keinginan untuk belajar menabuh gamelan (karawitan) sebagai sarana apresiasi seni yang juga berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Seni karawitan ini mengajarkan kebersamaan dan kekompakan agar dapat menghasilkan suara yang selaras, sesuai dengan namanya Baciro Laras. Diharapkan kelompok ini menjadi salah satu kelompok seni yang dapat menjadi percontohan untuk merintis Kelurahan Baciro menuju Kelurahan Budaya.



Foto 5. Kelompok Baciro Laras berlatih karawitan di Pendopo Kemantren



Foto 6. Kelompok Baciro Laras berlatih karawitan di Fasum RW 18

4. KEDAI CASPER

Adanya pandemi covid-19 memacu warga masyarakat Gondokusuman khususnya di Pengok Kidul, Baciro untuk berkreaitivitas untuk membuat berbagai kegiatan ekonomi alternatif, salah satunya dengan membuka Kedai Casper. Kedai Casper ini merupakan anak usaha ketiga dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pengok Kidul. Nama Casper dipilih sebagai analogi dari virus Corona. Suatu virus yang tidak diketahui wujud dan penawarnya namun dapat mengakibatkan kematian, seperti hantu yang menakutkan. Tokoh Casper digambarkan sebagai hantu yang baik hati. Masyarakat pun berharap virus Corona juga bisa bersahabat, dengan cara menerapkan hidup normal disertai protokol kesehatan yang disiplin, seperti mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.

Kedai Casper merupakan hasil swadaya warga yang bertempat di ruang hijau terbuka publik, Pengok Kidul. Selain membuka peluang usaha di bidang makanan dan minuman, di lokasi Kedai ini juga terdapat fasilitas sarana prasarana olah raga, seperti bulu tangkis, catur, dakon hingga karambol, dan fasilitas kesenian.



Foto 7. Kedai Casper

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis satu sasaran, terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman tercapai sebesar 400,6 atau 100,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan di Kemantren Gondokusuman termasuk dalam kategori yang cepat berkembang.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. **Pengembangan Kampung**
Untuk kegiatan pengembangan kampung dalam perencanaan program dan kegiatan agar mengedepankan pemberdayaan berbasis kampung dengan menggali potensi dan permasalahan wilayah serta menyusun *roadmap* potensi kampung. Setiap Kelurahan diharapkan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* atau workshop kampung untuk lebih menggali masukan, permasalahan dan pencarian solusi terbaik dengan mewujudkan dalam sebuah audiovisual untuk mempermudah gambaran. Selain itu perlu dilakukan *monitoring*, evaluasi dan melakukan optimalisasi program/kegiatan di kampung-kampung yang telah memiliki *branding/* tema pola pengembangan (seni budaya, budidaya sayur, hidroponik, tabulampot, bank sampah, batik, kuliner dan sebagainya). Dalam pelaksanaan pengembangan kampung perlu juga adanya peran serta generasi muda yang melibatkan karang taruna untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk usulan pengembangan wilayah diharapkan mengacu pada dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi.

3. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan perlu melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah baik sarana jalan-jalan kampung, saluran drainase dan air limbah, penataan lingkungan sungai, bangunan-bangunan penunjang kegiatan kewilayahan maupun fasilitas penerangan lingkungan. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan kesehatan khususnya stunting dilaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi di tingkat Kemantren, serta pemberian makanan tambahan yang berlokus di Kelurahan Baciro sebanyak 45 anak.
4. Untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban perlu melakukan pendataan potensi pondokan, pedagang kaki lima sebagai dasar penyusunan peta potensi kerawanan, pengoptimalan ketugasan Linmas di setiap wilayah untuk membantu pengamanan dan peningkatan jaga warga, melaksanakan sambang kampung secara bersama baik Kemantren maupun Kelurahan dan stakeholder yang ada di wilayah dengan pengurus wilayah setempat, melaksanakan penguatan potensi kampung dari aspek penanggulangan dan mengatasi adanya bencana melalui Forum Relawan Gondokusuman (FOREG). Selain itu juga perlu melaksanakan pencegahan dan pembersihan tindakan vandalisme/ aksi corat coret yang masih sering dilaksanakan oleh oknum-oknum pelajar, melakukan gerakan bersama antara Polsek dan Koramil dalam pemberantasan dan sidak penjual/pemakai miras.
5. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 maka perlu diberdayakan kembali pelaku-pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di masyarakat antara lain dengan melaksanakan berbagai pelatihan/workshop/pendampingan/*display* hasil UMKM, POKTAN (kelompok Tani), membeli produk-produknya untuk konsumsi rapat/kegiatan dinas, memasukkannya dalam suatu *database*, menghubungkannya dengan para pelaku usaha jasa pariwisata dan seni budaya, menghubungkan dengan LPM Kampus dan menggali kembali potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah serta untuk dikembangkan lebih lanjut.